

## EVALUASI AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PERENCANAAN APBD TERHADAP KINERJA ANGGARAN DAERAH: SEBUAH KAJIAN LITERATUR

**Mufarrihah<sup>1</sup>, Lailatul Atikah<sup>2</sup>, Mohamad Djasuli<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Trunojoyo Madura  
Email: [mufarrihahifa@gmail.com](mailto:mufarrihahifa@gmail.com)

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan penelitian terkait dengan akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta hubungannya dengan kinerja anggaran daerah. Penelitian ini menyajikan tinjauan literatur yang komprehensif dengan mengacu pada 35 jurnal yang telah direview melalui analisis terhadap berbagai artikel yang terindeks SINTA 1, termasuk dalam database jurnal akuntansi terkemuka, penelitian ini menyoroti temuan-temuan penting yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan APBD dalam konteks kinerja anggaran daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan APBD dalam meningkatkan kinerja anggaran daerah. Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan dan evaluasi dalam implementasi kebijakan terkait APBD di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya dalam memahami hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan APBD dengan kinerja anggaran daerah.*

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Perencanaan APBD, Kinerja Anggaran Daerah.

### ABSTRACT

*This research aims to evaluate research developments related to accountability, transparency and planning of Regional Revenue and Expenditure Budgets (APBD) and their relationship with regional budget performance. This research presents a comprehensive literature review by referring to 35 journals that have been reviewed through analysis of various articles indexed by SINTA 1, including in leading accounting journal databases. This research highlights important findings related to accountability, transparency and APBD planning in context of regional budget performance. It is hoped that the results of this research will provide a deeper understanding of the importance of accountability, transparency and APBD planning in improving regional budget performance. It is hoped that the findings from this research can become a basis for improvement and evaluation in the implementation of policies related to the APBD at the regional level. Apart from that, it is also hoped that this research can contribute to further research in understanding the relationship between accountability, transparency and APBD planning and regional budget performance.*

**Keywords:** Accountability, Transparency, APBD Planning, Regional Budget Performance.

### PENDAHULUAN

Menurut Hikmah, (2020) Manajemen dan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik mencakup pengelolaan yang demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, responsif, dinamis, dan taat asas. Oleh karena itu, manajemen dan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik harus dikembangkan melalui penataan administrasi, yaitu dengan pencatatan data dan informasi secara tepat. Langkah penyempurnaan administrasi ini penting untuk mendukung tata kelola dan pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat menjamin pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan kinerja

pemerintah daerah saat ini menjadi perhatian publik karena hasil yang dicapai belum dirasakan memadai oleh masyarakat. Masyarakat mengharapkan pemerintah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sebagai implementasi dari konsep otonomi daerah. (Aprilia, 2019) kinerja merujuk pada kemampuan untuk bekerja yang tercermin dalam hasil yang dicapai. Pemerintah dianggap memiliki kinerja yang baik jika dapat mengelola pemerintahan dengan efektif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah elemen penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan infrastruktur di daerah, (Badruzzaman, S., & Ruslina Lisda, 2018) program-program pembangunan harus dimasukkan dalam pembahasan anggaran agar dapat dibiayai dan dilaksanakan dengan baik, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan terarah dan terkendali. APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Periode anggaran APBD mencakup satu tahun, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Indra, (2006) menyampaikan bahwa dalam anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode di masa depan. Freeman (2003) dalam (Arief & Suparno, 2023) menyatakan bahwa anggaran adalah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya terhadap kebutuhan yang tidak terbatas, menyoroti peran strategis anggaran dalam kekayaan sebuah organisasi politik. Selanjutnya, (Guruh Putra Arka et al., 2022) mengartikan anggaran sebagai dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter untuk suatu periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Mengenai rentang satu tahun anggaran ini, realisasi anggaran harus dilakukan agar perencanaan keuangan dapat mengatasi masalah pembangunan yang ada di daerah. Akuntabilitas pemerintah memiliki tiga tujuan utama: pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.

Pertanggungjawaban pemerintah diwujudkan melalui penyediaan informasi mengenai setiap tindakan, kegiatan, dan pengelolaan keuangan yang dilakukan selama satu periode. Selain itu, akuntabilitas pemerintah harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntabilitas ini juga harus memungkinkan pelaksanaan

pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Negara yang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas pemerintahan menjadi fokus utama masyarakat karena dapat mencegah praktik korupsi. Oleh karena itu, akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan ini terkait dengan pencegahan penyalahgunaan dana publik (Aprilia, 2019).

Akuntabilitas dalam APBD berarti bahwa yang bertanggung jawab harus memberikan laporan dan penjelasan tentang semua kegiatan kepada pihak yang memberikan otoritas untuk meminta pertanggungjawaban (Khotami, 2017). Akuntabilitas mengharuskan para pemegang amanah, seperti pejabat publik atau badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan APBD, untuk memberikan pertanggungjawaban secara jelas dan transparan. Ini mencakup kewajiban untuk menyajikan semua kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana APBD secara detail dan akurat. Selain itu, mereka juga harus melaporkan segala penggunaan dana dan hasilnya kepada pihak yang memiliki kewenangan, seperti pemerintah daerah atau badan pengawas, yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan APBD tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa penggunaan dana APBD dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat serta tujuan pembangunan daerah.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal perencanaan anggaran, penunjukan/persetujuan, dan pelaksanaan, menjadi kunci penting bagi pengelolaan keuangan yang efektif dan pertanggungjawaban kepada publik (Hutabalian, R., Razak, A., Arief, M., & Ruslan, 2016). Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik telah menjadi fokus utama dalam upaya membangun tata kelola keuangan yang baik di tingkat daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), aspek-aspek seperti perencanaan anggaran, penunjukan/persetujuan, dan pelaksanaan memegang peran krusial dalam menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Konsep ini menjadi semakin penting karena bukan hanya memastikan efektivitas alokasi dan penggunaan dana publik, tetapi juga membangun tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan APBD menjadi penting sebagai bagian dari pemahaman yang holistik terhadap kinerja anggaran daerah. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dan bermanfaat untuk pengelolaan keuangan dalam setiap organisasi atau lembaga. Transparansi (keterbukaan) didefinisikan sebagai upaya untuk menjalankan organisasi atau lembaga secara terbuka dengan menyediakan informasi yang

mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Sementara itu, akuntabilitas (pertanggungjawaban) berarti memberikan laporan tentang kinerja dan kegiatan seorang pemimpin organisasi sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, diperlukan sistem pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan yang baik dan tepat, agar informasi yang relevan dan mudah dipahami dapat tersedia bagi para pemangku kepentingan.

Bastian, (2006) menjelaskan bahwa APBD adalah implementasi dari agenda kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk nilai uang untuk periode satu tahun. Fokus utama dari APBD adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana yang tepat dan efektif. APBD menjadi instrumen utama dalam mengatur sumber daya keuangan daerah guna mendukung berbagai program dan kegiatan yang mendukung tujuan pembangunan daerah. Maka dari itu diperlukan Pengawasan yang pada dasarnya bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang hendak dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan keuangan daerah merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 tahun 2010).

Selain pengawasan pengelolaan keuangan, aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pemerintah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat. Dengan demikian, kualitas kinerja pemerintah dapat dinilai baik karena telah memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkat.

Studi literatur menjadi sarana yang penting untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja anggaran daerah, serta implikasi dari tingkat akuntabilitas dan transparansi yang terwujud dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, perlu memperhatikan berbagai

aspek, di antaranya adalah akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan transparansi anggaran. Akuntabilitas keuangan berperan penting dalam pengelolaan keuangan, seperti yang dijelaskan oleh (Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, 2013), bahwa akuntabilitas melibatkan pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pemerintah terhadap seluruh aktivitasnya, bukan hanya aspek finansial. Prinsip ini menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pemerintahan harus memberikan informasi yang dibutuhkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini penting karena akuntabilitas menjadi tolok ukur apakah aktivitas pemerintah atau layanan yang diberikan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta apakah layanan publik tersebut mampu memenuhi kebutuhan nyata rakyat (Winarno, 2015). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan APBD dengan kinerja anggaran daerah melalui tinjauan literatur yang komprehensif.

Terkait penelitian ini, kami melakukan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik evaluasi akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan APBD terhadap kinerja anggaran daerah. Kami mengidentifikasi jurnal-jurnal yang terkait dengan akuntansi, keuangan daerah, dan manajemen anggaran untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara akuntabilitas, transparansi, perencanaan APBD, dan kinerja anggaran daerah. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan arahan bagi peneliti dan praktisi di bidang ini untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, kami juga melakukan pengelompokan terhadap metode penelitian dan tema penelitian yang ada dalam artikel-artikel yang kami telaah, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tren penelitian dan fokus kajian dalam literatur terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik terkait evaluasi akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan APBD terhadap kinerja anggaran daerah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan aspek penting dalam pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Terdapat tiga konsep utama yang menjadi fokus dalam pengelolaan APBD: akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan anggaran.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan laporan, penjelasan, dan pertanggungjawaban kepada publik atas tindakan dan kebijakan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. Menurut (Bovens, 2007), akuntabilitas mencakup aspek politik, administratif, profesional, dan sosial. Akuntabilitas politik melibatkan hubungan antara pemerintah dengan lembaga perwakilan rakyat, di mana pemerintah harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan anggarannya. Akuntabilitas administratif merujuk pada kewajiban pejabat publik untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Akuntabilitas profesional menuntut agar pegawai negeri menjalankan tugas dengan standar kompetensi tertentu, sementara akuntabilitas sosial berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat luas. Dalam konteks APBD, akuntabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, menghindari penyalahgunaan dana, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Transparansi mengarah pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh publik terkait pengelolaan anggaran daerah. Hood (2006) menyatakan bahwa transparansi adalah komponen kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi korupsi. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai alokasi dan penggunaan anggaran, sehingga mereka dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam konteks APBD, transparansi tidak hanya berarti menyediakan informasi keuangan, tetapi juga menyangkut proses penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pelaporannya. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan anggaran disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk publikasi rencana anggaran, laporan realisasi anggaran, serta audit dan evaluasi kinerja anggaran. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Perencanaan anggaran adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menentukan prioritas dan alokasi sumber daya keuangan berdasarkan tujuan dan kebutuhan daerah. (Fres, 2022) menekankan bahwa perencanaan anggaran yang baik harus mencakup analisis kebutuhan, proyeksi pendapatan, dan alokasi dana yang efektif. Perencanaan yang matang dan partisipatif dapat meningkatkan kinerja anggaran karena lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Perencanaan anggaran yang efektif melibatkan

berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga perwakilan, dan instansi terkait. Proses ini harus didasarkan pada data yang akurat dan relevan, serta mempertimbangkan berbagai aspek seperti prioritas pembangunan, potensi pendapatan daerah, dan efisiensi penggunaan dana. Dengan melibatkan berbagai pihak, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa alokasi anggaran yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas daerah, serta dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan dengan lebih baik.

Kajian empiris mendukung pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan anggaran dalam meningkatkan kinerja anggaran daerah. Penelitian oleh (Winarno, 2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran daerah. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin baik pula kinerja anggaran yang dihasilkan karena adanya mekanisme kontrol dan evaluasi yang ketat. Studi oleh (Susanto, 2017) menemukan bahwa transparansi anggaran memiliki dampak positif terhadap kinerja anggaran daerah. Transparansi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran, mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan dana, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hasil penelitian dari (Prasetyo, 2018) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang baik dan komprehensif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja anggaran daerah. Perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan didasarkan pada data yang akurat dapat menghasilkan alokasi dana yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis untuk mengkaji pertumbuhan penelitian tentang akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan APBD terhadap kinerja anggaran daerah. Tinjauan literatur sistematis adalah proses mengidentifikasi, memilih, mengevaluasi, mensintesis, dan menafsirkan temuan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari tinjauan pustaka yang sistematis adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif tentang bukti ilmiah yang tersedia terkait dengan suatu masalah atau pertanyaan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal-jurnal terkait dengan akuntabilitas, transparansi, perencanaan APBD, dan kinerja anggaran daerah. Kriteria pemilihan artikel tersebut adalah:

- 1) Artikel yang membahas hubungan antara akuntabilitas, transparansi, perencanaan APBD, dan kinerja anggaran daerah.

- 2) Artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2014-2023).
- 3) Artikel yang relevan dengan konteks pemerintahan daerah di Indonesia atau negara lain.

Pencarian data dilakukan melalui database jurnal ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, dan Sintidikti dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti "akuntabilitas", "transparansi", "perencanaan APBD", "kinerja anggaran daerah", dan kombinasi kata kunci tersebut. Teknik snowball juga digunakan untuk mencari artikel tambahan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode naratif untuk menyajikan temuan-temuan dari artikel-artikel yang telah dipilih. Metode naratif adalah metode analisis data kualitatif yang menggabungkan deskripsi, interpretasi, dan evaluasi dari hasil penelitian yang ada. Langkah-langkah analisis data meliputi:

- 1) Membaca dan memahami isi dari setiap artikel yang dipilih.
- 2) Mengekstrak informasi penting dari setiap artikel.
- 3) Mengelompokkan artikel-artikel berdasarkan kategori-kategori tertentu untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dalam literatur yang ditinjau.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap kinerja anggaran daerah melalui analisis tinjauan literatur dari 35 jurnal yang relevan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang mencakup teori akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan APBD.

Dari hasil analisis 35 jurnal, ditemukan beberapa temuan yang relevan. Temuan pertama adalah bahwa implementasi akuntabilitas dan kinerja dalam Program Dana Desa perlu ditingkatkan untuk memberikan efek optimal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis data publik seperti laporan BPK dan data dari BPS untuk mengevaluasi fungsi akuntabilitas dan program Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas memainkan peran penting dalam pelaksanaan program Dana Desa dan perlu ditingkatkan untuk mencapai efek optimal (Anggraini, 2023).

Temuan kedua adalah bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa. Penelitian menunjukkan bahwa semakin baik transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa, semakin baik pula pengelolaan Dana Desa di Desa Bangun

Harjo. Selain itu, akuntabilitas juga memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa di desa tersebut (Alfala, M. K., Mukhzarudfa, M., & Mansur, 2024).

Temuan ketiga adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan krusial terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah. Informasi akuntansi yang berkualitas dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat, sehingga tata kelola dan tanggung jawab keuangan daerah perlu diperhatikan untuk memastikan informasi akuntansi yang terpercaya (Kromen, M. L. B., Manafe, H. A., & Perseveranda, 2023).

Temuan keempat adalah bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Penelitian menunjukkan bahwa adopsi praktik akuntabilitas dan transparansi yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, 2013).

Temuan kelima adalah bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa memiliki dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas dan transparansi yang baik dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa (Aprilia, 2019).

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mendalami faktor-faktor yang telah diidentifikasi dalam hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah serta kepercayaan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut, dapat diperoleh wawasan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di Indonesia. Tantangan bisnis yang unik di Indonesia, termasuk kondisi sosial dan lingkungan yang beragam, juga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan praktik akuntabilitas dan transparansi yang berkelanjutan.

Rekomendasi dari penelitian ini dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pengawas, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat meningkatkan komitmen terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan efektif. Lembaga pengawas dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Akademisi dapat terus melakukan penelitian dan pengembangan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama juga dapat berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah serta memperjuangkan praktik akuntabilitas yang lebih baik.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis dari beberapa jurnal menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada kantor pemerintah daerah di Kabupaten. Berdasarkan analisis data penelitian, pegawai yang bekerja di setiap SKPD telah menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan yang dilaksanakan selama ini sudah tergolong sangat transparan. (Junaidi, 2009) ada beberapa hal yang disebabkan karena setiap aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan pelaporan keuangan sudah mengikuti standar operasional prosedur (SOP), yang telah digunakan sebagai panduan dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada publik. SOP tersebut berisi tahapan dan urutan suatu pekerjaan yang membimbing para pegawai dalam menyelesaikan tugas mereka. Pelaksanaan transparansi keuangan di setiap unit SKPD pada kantor pemerintah daerah Kabupaten dikatakan berjalan dengan baik karena penyelenggaraan urusan pemerintahan sudah terlaksana sesuai dengan visi dan misi. Hal ini karena setiap unit SKPD telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk menunjang pengelolaan keuangan secara transparan, setiap SKPD selalu mengalami pengawasan keuangan terkait dengan proses dan laporan pertanggungjawaban dari setiap unit SKPD dalam lingkup kantor pemerintah di beberapa Kabupaten. Pengawasan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk mendukung pengumpulan yang dikeluarkan oleh masing-masing unit SKPD dalam lingkup kantor pemerintah daerah di Kabupaten tersebut.

Teori stewardship mengasumsikan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kesuksesan organisasi dan kepuasan principal. Steward bertugas melindungi dan mengoptimalkan nilai pemegang saham melalui kinerja organisasi. Oleh karena itu, fungsi utilitas steward harus dimaksimalkan. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan yang dilakukan selama ini diharapkan dapat

meningkatkan kinerja keuangan. Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan keuangan pada setiap SKPD dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten tersebut menunjukkan bahwa pimpinan atau atasan secara langsung dan rutin melakukan pemantauan untuk menunjang efektivitas dalam pengelolaan keuangan di SKPD tersebut. Selain itu, prinsip transparansi (Hanafiah, R. R., Abdullah, S. A. S., & Saputra, 2016) dalam pengelolaan keuangan juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan anggaran yang dilaksanakan selama ini sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis persepsi pegawai yang bekerja pada SKPD dalam lingkup kantor pemerintah daerah di Kabupaten tersebut, pelaksanaan sistem penganggaran yang dilakukan selama ini sudah menerapkan prinsip transparansi, yang dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengelolaan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan pada setiap unit SKPD di kantor pemerintah daerah Kabupaten tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

### **Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Anggaran Belanja Daerah**

Akuntabilitas merupakan persyaratan penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan jujur. Kualitas laporan keuangan yang baik terkait erat dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, informasi yang disajikan akan lebih relevan, dapat diandalkan, dibandingkan, dan dipahami. (Aulia et al., 2023), akuntabilitas publik merupakan dasar dari pelaporan keuangan pemerintah, dan merupakan tujuan utama dari pelaporan keuangan pemerintah. Adanya tuntutan yang tinggi terhadap akuntabilitas pemerintah daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melakukan suatu kegiatan. Transparansi merupakan syarat penting dalam menciptakan Good Governance, di mana dengan transparansi dalam setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, keadilan dapat ditanamkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang diperlukan, baik informasi keuangan maupun informasi lainnya, untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntabilitas pemerintahan juga harus memungkinkan

terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Akuntabilitas pemerintah tidak hanya berlaku di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah sampai ke wilayah pedesaan, yang semuanya membutuhkan pertanggungjawaban atas setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam konteks akuntabilitas, kejujuran yang lebih ditekankan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan jabatan telah diantisipasi dengan adanya struktur jabatan dan kebijakan yang mengatur wewenang dari jabatan tersebut. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, yang mengatur kewenangan dalam pengelolaan APBD, termasuk pengawasan oleh DPRD dan pengendalian intern oleh kepala daerah. Ada juga instansi seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lainnya yang memiliki tugas mengawasi pengelolaan APBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas merupakan persyaratan penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan jujur. Kualitas laporan keuangan yang baik terkait erat dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, informasi yang disajikan akan lebih relevan, dapat diandalkan, dibandingkan, dan dipahami. Menurut Abdul Halim dan M. Syam Kusufi (2012), akuntabilitas publik merupakan dasar dari pelaporan keuangan pemerintah, dan merupakan tujuan utama dari pelaporan keuangan pemerintah. Adanya tuntutan yang tinggi terhadap akuntabilitas pemerintah daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melakukan suatu kegiatan.

Menurut Hasanah, (2017) transparansi merupakan syarat penting dalam menciptakan Good Governance, di mana dengan transparansi dalam setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, keadilan dapat ditanamkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang diperlukan, baik informasi keuangan maupun informasi lainnya, untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntabilitas pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Akuntabilitas pemerintah tidak hanya berlaku di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah sampai ke wilayah pedesaan, yang semuanya membutuhkan pertanggungjawaban atas setiap anggaran

dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam konteks akuntabilitas, kejujuran yang lebih ditekankan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan jabatan telah diantisipasi dengan adanya struktur jabatan dan kebijakan yang mengatur wewenang dari jabatan tersebut. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, yang mengatur kewenangan dalam pengelolaan APBD, termasuk pengawasan oleh DPRD dan pengendalian intern oleh kepala daerah. Ada juga instansi seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lainnya yang memiliki tugas mengawasi pengelolaan APBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga menetapkan pedoman bagi Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dalam menyusun SOP yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Meskipun kedua pedoman tersebut hampir sama, yaitu memberikan acuan dan langkah-langkah dalam penyusunan SOP bagi instansi pemerintah, terdapat sedikit perbedaan dalam ketentuan penelitian dan format dokumen, namun tidak mempengaruhi alur pelaksanaan tugas. Dalam konteks ini, pemerintah akan menggunakan PERMENPAN 35 Tahun 2012 sebagai referensi. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah, atau SOP-AP, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah oleh organisasi pemerintah, yang menjelaskan bagaimana, kapan, dimana, dan oleh siapa tugas tersebut dilaksanakan. Administrasi Pemerintah dalam konteks ini merujuk pada pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan oleh organisasi pemerintah. SOP-AP kemudian dibagi menjadi SOP-AP Administratif dan SOP-AP Teknis. SOP-AP Administratif adalah prosedur standar umum dan tidak rinci untuk kegiatan yang melibatkan lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan, sedangkan SOP-AP Teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci untuk kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.

### **Evaluasi dan Transparansi Dalam Penyusunan Kinerja APBD**

Hasanah, (2017) menjelaskan mengenai evaluasi dan transparansi dalam penyusunan kinerja APBD melibatkan beberapa aspek yang penting. Pertama, evaluasi akuntabilitas dalam penyusunan APBD dilakukan untuk memastikan bahwa mekanisme

pertanggungjawaban yang diterapkan dalam proses penganggaran sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas yang tinggi. Hal ini penting agar masyarakat dapat menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Selanjutnya, transparansi dalam penyusunan APBD juga menjadi fokus pembahasan, dimana aspek ini mencakup keterbukaan informasi mengenai perencanaan anggaran, pengumpulan data, analisis kebutuhan, pengambilan keputusan, dan penyusunan dokumen APBD. Dengan transparansi yang baik, masyarakat dapat memahami alasan di balik setiap keputusan anggaran yang diambil oleh pemerintah daerah. Selain itu, pembahasan juga mencakup evaluasi kinerja APBD yang telah disusun, dengan menganalisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Evaluasi ini melibatkan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam APBD dengan capaian yang sebenarnya, serta analisis dampak kebijakan anggaran terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Terakhir, pembahasan juga membahas implikasi dari evaluasi dan transparansi dalam penyusunan APBD, yang dapat berupa rekomendasi untuk perbaikan proses penyusunan APBD di masa yang akan datang, serta langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan demikian, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran dan sejauh mana proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### **Hubungan Antara Akuntabilitas, Tranparansi, dan Perencanaan APBD Terhadap Kinerja Anggaran Di Suatu Daerah**

Hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan APBD memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja anggaran di suatu daerah. (Mardiasmo, 2001) akuntabilitas memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas yang baik, pemerintah daerah diharapkan dapat bertanggung jawab atas setiap keputusan pengeluaran anggaran yang diambil, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan atau penyelewengan anggaran. Transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas kinerja anggaran. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah, sehingga dapat menghasilkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, transparansi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat memperkuat legitimasi kebijakan anggaran yang diambil.

Perencanaan APBD yang baik juga berkontribusi terhadap kinerja anggaran yang optimal. (Halim, Abdul dan Iqbal, 2012) dengan perencanaan yang matang, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi dengan jelas prioritas pembangunan yang harus didukung oleh anggaran, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, perencanaan yang baik juga dapat membantu pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi risiko atau hambatan dalam pelaksanaan anggaran. Secara keseluruhan, hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan APBD saling melengkapi dan saling memperkuat dalam meningkatkan kinerja anggaran di suatu daerah. Dengan mengoptimalkan ketiga aspek tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kolaborasi antara berbagai pihak dalam mendorong praktik akuntabilitas dan transparansi yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi efektivitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja anggaran daerah. Implementasi akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap kinerja anggaran daerah di Indonesia sangat penting. Temuan dari berbagai jurnal menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi penggunaan dana, pengendalian pengeluaran yang tepat, serta pencapaian program-program yang optimal dalam konteks pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.

Praktik akuntabilitas yang baik memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat transparansi yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana publik dan memastikan akuntabilitas pemerintah daerah.

Selain itu, perencanaan APBD yang baik juga menjadi kunci dalam mencapai kinerja anggaran daerah yang optimal. Perencanaan yang matang dan terstruktur memungkinkan alokasi dana yang tepat sasaran, pengendalian pengeluaran yang efisien, serta evaluasi yang berkala terhadap capaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian,

implementasi praktik akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan APBD yang baik dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan kinerja anggaran daerah.

### Saran

Di tengah dinamika bisnis dan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap praktik akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan APBD. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pengawas, akademisi, dan masyarakat, menjadi kunci dalam memperkuat implementasi praktik-praktik tersebut. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif untuk pengelolaan keuangan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kinerja anggaran daerah melalui praktik akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan APBD yang baik. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfala, M. K., Mukhzarudfa, M., & Mansur, F. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 747-.
- Anggraini, R. (2023). Akuntabilitas dan Kinerja: Telaah pada Program Dana Desa. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan*, 4(2), 327-.
- Aprilia, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109–122. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18>
- Arief, S., & Suparno, S. (2023). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 23–30. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.21112>
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–4.
- Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner*, 7(3), 2112–2120. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1462>
- Badruzzaman, S., & Ruslina Lisda, S. E. (2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey Pada Dinas Di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Fakultas*

- Ekonomi Dan Bisnis Unpas Bandung.* <http://repository.unpas.ac.id/Id/Eprint/37365>
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal, 13*(4), 447.
- Fres. (2022). No Title 10, ה-10 העינים. נגדי לשבאות מה את (8.5.2017), 2005–2003. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Guruh Putra Arka, Armel Yentifa, & Josephine Sudiman. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Parambahana Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(2), 74–79. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i2.33>
- Halim, Abdul dan Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Edisi Keti). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hanafiah, R. R., Abdullah, S. A. S., & Saputra, M. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Di Skpk Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(4). <http://e-repository.unsyiah.ac.id/Jaa/Article/View/5733>
- Hasanah, N. dan A. F. (2017). *Akuntansi Pemerintah*. In Media.
- Hikmah, L. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. *Doctoral Dissertation*.
- Hutabalian, R., Razak, A., Arief, M., & Ruslan, A. (2016). Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua Dalam Rangka Terwujudnya Good Financial Governance. *Jurnal Hukum, Kebijakan Dan Globalisasi*, 48, 1–7.
- Indra, B. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Junaidi. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. *Jurnal Konstitusi* 6, 3.
- Khotami. (2017). *Konsep Akuntabilitas Dalam Good Governance*. Erlangga.
- Kromen, M. L. B., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(4), 46.
- Mardiasmo. (2001). *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Andi,.
- Prasetyo, H. (2018). Perencanaan Anggaran dan Kinerjanya di Pemerintah Daerah: Sebuah Studi Empiris. *Jurnal Manajemen Publik*, 10(3), 200.
- Susanto, Y. (2017). Transparansi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Anggaran di Pemerintah Daerah. . . *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 145.
- Winarno, B. (2015). Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 19(1), 45-.